

# MENGANALISIS PENGARUH OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Nirara Rossa<sup>1</sup>, Ario Pamungkas, S.Kom, M. Si<sup>2</sup>, Marcha Nasyra<sup>3</sup>, Yusuf Hlbaban<sup>4</sup>, Indri Rahmadni<sup>5</sup>, Jivalia Ximenes Pereira<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

e-mail: [Nirararossa1109@student.esaunggul.ac.id](mailto:Nirararossa1109@student.esaunggul.ac.id)

## Abstrak

Kewenangan dalam daerah untuk mengurus dan mengelola kepentingan rakyat dikenal sebagai otonomi daerah. Kewenangan ini didasarkan pada keinginan masyarakat dan undang-undang. Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah memicu perubahan dalam struktur pemerintahan yang berhubungan antara pemerintah federal dengan wilayah. Program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan memperkuat demokrasi lokal. Kesejahteraan rakyat sendiri adalah kondisi di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Serta memiliki kualitas hidup yang layak. Kesejahteraan sendiri mencakup beberapa aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkesinambungan. Dalam konteks ini kesejahteraan rakyat menjadi salah satu tujuan penting, di mana pemerintah daerah memikul tanggung jawab secara langsung untuk meningkatkan keberlangsungan masyarakat melalui kebijakan atau program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

## Kata kunci

otonomi daerah , kesejahteraan rakyat , program otonomi daerah

## Abstract

*Regional autonomy is regional authority which is tasked with regulating and maintaining the interests of the local community. This authority it was founded on community aspirations and statutory regulations. Indonesia's implementation of regional autonomy has triggered changes inside of government structure relating to the both the national and local governments. The autonomy of the region program is expected to accelerate regional development, increase community political participation, and strengthen local democracy. People's welfare itself is a situation that where individuals may meet their*

*fundamental necessities such as food, clothing, shelter, education, health, as well as have a decent quality of life. Welfare itself includes several sustainable social, economic and environmental aspects. In this context, people's welfare is an important goal, where local governments have direct responsibility for raising people's standard of living by policies or programs that are tailored to local needs.*

### **Keywords**

*regional autonomy, people's welfare, regional autonomy program*

### **Pendahuluan**

Otonomi daerah digambarkan sebagai tugas rumah yang diberikan kepada setiap anak. Maksud dari "setiap anak sendiri" adalah suatu daerah jadi Setiap anak (daerah) punya tugas dan wewenang sendiri untuk mengurus kelasnya (daerahnya). Tujuannya sendiri adalah agar daerah tersebut dapat berkembang sendiri. Menurut peraturan perundang-undangan, daerah otonom mempunyai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi urusan pemerintahan serta kepentingan lokal. ketika menerapkan otonomi daerah. Terlepas dari fakta bahwa memiliki potensi yang besar, Implementasi otonomi daerah juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain koordinasi antar pemerintah, keterbatasan sumber daya, dan buruknya kualitas sumber daya manusia.

Krisis ekonomi di Indonesia sendiri sudah terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang membuat perkembangan dan kebutuhan setiap daerah menjadi krisis. Dengan banyaknya orang yang lebih memilih mengkonversi rupiah ke dollar karena lebih berharga dan bernilai. Itu

sudah menjadi bukti bahwa krisis nilai mata uang yang menurun di karenakan krisis nya ekonomi negara.

Otonomi daerah merupakan faktor paling penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah sendiri juga merupakan salah satu kebijakan yang paling berperan dalam negara untuk memajukan suatu wilayah. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebijakan tersebut mulai berlaku. Walaupun Undang-Undang tersebut baru di adakan saat beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi indonesia masih memungkinkan untuk memperkembangkan ekonomi daerah melalui otonom daerah.

Perkembangan ekonomi dunia setiap tahun makin melesat perkembangan yang signifikan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. kemajuan ini bisa di nyatakan sebagai perkembangan positif dan juga negatif untuk beberapa warga. Positifnya adalah dengan adanya berbagai pengetahuan dan teknologi baru, maka akan mempermudah hidup. Penemuan tersebutlah yang menciptakan masyarakat semakin melesat

berkembang. Tetapi negatifnya adalah dikarenakan dengan kemajuan tersebut maka akan mengembangkan peningkatan harga barang yang semakin melesat, kenaikan pajak, dan peralatan teknologi yang semakin berkembang.

Menyebabkan beberapa orang yang berada pada garis kemiskinan tidak sanggup untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut dan tidak dapat memenuhi standar keuangan yang di butuhkan untuk bersanding dengan kemajuan tersebut. Menghasilkan beberapa masyarakat yang kekurangan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkadang hal tersebutlah yang menciptakan garis lingkaran kemiskinan yang terus berulang.

Program dan kebijakan dalam otonomi daerah mempunyai tanggung jawab mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus urusan daerah. Maka dari itu otonomi daerah berlaku untuk memenuhi kebutuhan dan menyeimbangkan pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan faktor paling penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah sendiri juga merupakan salah satu kebijakan yang paling berperan dalam negara untuk memajukan suatu wilayah.

Manfaatnya meliputi pengembangan potensi daerah, efisiensi pemerintahan, dan pemerataan pembangunan. Namun, penerapan otonomi daerah juga menghadapi tantangan, seperti penyalahgunaan wewenang dan ketimpangan antar-daerah. Intinya, otonomi daerah bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis,

responsif, dan efisien dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengerti mengenai pengaruh otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Mengetahui lebih dalam bagaimana aturan otonom dapat membuat suatu daerah menjadi lebih makmur dan berkembang dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Serta ketimpangan sosial terhadap pendapatan dan kemiskinan warga sekitar.

Karena itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis peran wawasan nusantara dalam melestarikan jati diri bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana wawasan nusantara dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga jati diri bangsa Indonesia, serta bagaimana wawasan ini dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan untuk menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

## **Pembahasan**

Otonomi daerah adalah aturan yang di bikin oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur dan meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut untuk rakyat.

Dibandingkan negara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling kaya akan pulau. Oleh karena itu, gagasan otonomi daerah akan berjalan baik bila diterapkannya pemerintahan

negara kesatuan. Permasalahannya hanya, dengan melihat kondisi geografis, potensi berbagai daerah, dan sumber daya manusia, bagaimana pemerintah pusat di negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kerja sama pembangunan antar daerah? Konsep dan format apa yang terbaik untuk melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022)

Dalam melaksanakan kekuasaan dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945 (lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Pusat menjalankan tiga prinsip: Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi mengacu pada pendelegasian kekuasaan pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan; Dekonsentrasi adalah proses penyerahan kekuasaan pemerintah kepada lembaga vertikal di bidang tertentu atau kepada gubernur yang menjabat sebagai wakil pemerintah; Pemerintah memberikan tugas bantuan kepada daerah dan/atau desa; pemerintah provinsi memberikan tugas bantuan kepada kabupaten/kota dan/atau desa; dan pemerintah kabupaten/kota memberikan tugas bantuan kepada desa. (Dewi Hasniati Buton et al., 2022)

Otonomi daerah pertama kali di bikin di sebabkan agar tidak terlalu banyak mengarah ke pusat. Wilayah yang tidak teratur sering kali di akibatkan karena tidak adanya otonomi daerah yang di terapkan di wilayah tersebut. Tanpa

adanya otonomi daerah maka suatu daerah tidak akan ada perkembangan dan kemajuan ekonomi di wilayah tersebut. Wilayah yang berbeda beda pun juga masalah utama diadakannya otonomi daerah. Sebab setiap daerah juga mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Daratan dan cuaca juga berbeda di setiap daerah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara perkembangan daerah yang satu dengan yang lainnya.

### **Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah**

1. Asas Otonomi Daerah Kesatuan harus mendukung aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkuat negara kesatuan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Prinsip dan tanggung jawab yang nyata Otonomi daerah bersifat nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh masyarakat.
3. Pemerintah daerah berperan dalam mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Asas Kerukunan Selain unsur demokrasi, daerah otonom lebih mengutamakan faktor keselarasan dan tujuan.
5. Asas Pemberdayaan Meningkatkan efisiensi dan outcome penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tujuan otonomi daerah. sebagian besar di bidang pengembangan dan pelayanan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pertumbuhan kohesi nasional dan stabilitas politik.

### **Perbedaan Penerapan Otonomi Daerah Di Daerah Yang Berbeda-Beda Yang Dapat Mengembangkan Perekonomian Daerah**

Otonomi daerah dapat bekerja dengan baik apabila disesuaikan dengan keadaan lingkungan di daerah tersebut. Seperti yang diketahui bahwa setiap wilayah memiliki sumberdaya dan keanekaragaman lingkungan yang berbeda. Maka perlu di perhatikan bagaimana cara menerapkan sistem yang dapat menciptakan perkembangan yang optimal pada setiap daerah. Apabila ingin meningkatkan perekonomian di daerah tersebut, maka perlu di perhatikan apa yang dapat di lakukan di wilayah tersebut.

Berikut ini adalah apa yang dapat di perhatikan dalam mengelola perekonomian daerah:

1. Melihat potensi sumber daya alam
2. Mengembangkan industri yang dapat menciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar
3. Mengembangkan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, gedung, dan akses air.
4. Meningkatkan edukasi pendidikan
5. Memfasilitasi transportasi umum
6. Mengembangkan akses jalan bagi tempat yang susah terjangkau
7. Mengembangkan sektor untuk pariwisata
8. Mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan
9. Mengembangkan kemajuan teknologi
10. Mengembangkan industri yang dapat memfasilitasi keuangan agar keuangan dapat berputar dengan baik di daerah tersebut (Syarifudin, 2022)

### **Pengaruh Perkembangan Ekonomi Daerah Terhadap Kemiskinan**

Pembangunan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia yang di bawah garis kemiskinan. Bagi mereka perkembangan ekonomi dapat menghambat mereka untuk naik tingkat menjadi kalangan menengah. Dikarenakan adanya kenaikan keuangan, inflasi, pajak, dan uang untuk kebutuhan sehari-hari menyebabkan tidak adanya kesempatan untuk merubah dalam meningkatkan perekonomian mereka.

Oleh karena itu, lebih baik jika selalu tersedia banyak lapangan kerja di setiap daerah untuk menurunkan jumlah individu yang ada di bawah garis kemiskinan, menyediakan kesempatan kerja, dan menstabilkan perekonomian.

Walaupun begitu, tetapi masih ada kebanyakan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan melakukan hal ini karena distribusi yang tidak dilakukan secara merata. Jadi pembangunan ekonomi pada dasarnya dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan, namun masih perlu dipertimbangkan kembali apabila kebijakan tersebut sudahlah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Program otonomi daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan desentralisasi kewenangan, pengelolaan sumber daya lokal, dan pelayanan publik yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang mendukung otonomi daerah memungkinkan pemerataan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi daerah.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi, pengawasan yang efektif,

serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dengan mengatasi tantangan seperti korupsi, ketimpangan sumber daya, dan lemahnya pengawasan, otonomi daerah dapat menjadi fondasi kuat untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan pembagian ekonomi yang adil di seluruh Indonesia.

## Referensi

- Dewi Hasniati Buton, R.Siti Mardiaty Narjilah, & Erik. (2022). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3>. 43
- Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2>. 56
- Syarifudin, S. (2022). Konsep Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Otonomi Daerah. *Jurnal Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Otonomi Daerah*, 1(1).